
PEMBINAAN ORGANISASI KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SUMEDANG OLEH DISPARBUDPORA

Dadan Setia Nugraha*¹, Amin Rohidin², Dela Riska Mubarakah³, Lystia Khairani⁴, Reval Irawan⁵,
Rindu Syahrani Iklima Putri⁶, Wida Nur Melinda⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 10, 2025

Revised Mei 31, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

Organization

Organizational Development

Cultural Organization

Cultural Heritage

ABSTRACT

The aim of the research conducted by the researchers was to analyze how cultural organizations in Sumedang Regency are fostered by Disparbudpora, what factors hinder it, and how to overcome the obstacles. The research method used in this research is a qualitative research method. With research informants, namely the Head of Culture, Functional Position in the Cultural Sector, Regional Arts and Culture Expert Staff. The data collection techniques used were literature study and field study consisting of observation, interviews and documentation. Meanwhile, the processing procedures in this research are data reduction, data presentation, data verification and triangulation. Based on the research results, it was concluded that the development of cultural organizations carried out by the Sumedang Disparbudpora showed that the Cultural Organization at the Sumedang Regency Tourism, Culture, Youth and Sports Department was effective. This was reviewed from the preparation of guidance guidelines carried out by Disparbudpora and then by determining the methods carried out directly into the field. The inhibiting factor in developing cultural organizations is the budget factor, which currently the government, especially the government departments, is still trying to maximize the development of cultural organizations. Disparbudpora's efforts to overcome factors inhibiting the development of organizational groups include efforts to increase training and development as well as improving facilities and infrastructure.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Dadan Setia Nugraha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No.19 - Sumedang

Email: dadan_setia@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Kebudayaan merupakan ciri khas dari beberapa daerah. Sedangkan kebudayaan nasional merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah itu sendiri. Penyatuan dari unsur-unsur budaya daerah tercemin menjadi satu kesatuan budaya nasional yang utuh. Jadi dapat dikatakan, budaya nasional adalah cerminan dari budaya daerah-daerah yang beragam.

Fungsi budaya bagi sebuah negara sangat penting dan beragam. Budaya berfungsi sebagai identitas, yaitu penanda yang membedakan peradaban suatu negara atau masyarakat dari yang lainnya. Identitas budaya ini menjadi ciri khas yang mempertegas keberadaan dan keunikan suatu bangsa. Budaya berperan sebagai batas yang menciptakan perbedaan antar kelompok masyarakat atau bangsa, membuat setiap negara memiliki kekhasan yang membedakannya dari yang lain. Selain itu, budaya juga berfungsi sebagai pembentuk perilaku dan sikap. Melalui kebiasaan yang terbentuk dari gagasan dan pemikiran manusia, budaya mengatur dan mengarahkan cara bertindak serta sikap individu dalam masyarakat. Fungsi lain dari budaya adalah sebagai komitmen bersama, di mana budaya membantu menciptakan kesepakatan dalam kelompok masyarakat yang melampaui kepentingan pribadi, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas. Serta budaya berperan sebagai media komunikasi. Dalam budaya terdapat bahasa dan berbagai produk budaya lain, seperti tari dan musik, yang menjadi sarana untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu kepada masyarakat luas.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemajuan kebudayaan adalah dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya. Aturan-aturan yang dibuat tersebut, tidak hanya sebagai upaya perlindungan tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembinaan, pemeliharaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kepada Masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi menjaga ketahanan budaya Indonesia di Tengah peradaban dunia yang semakin berkembang saat ini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan salah satu urusan pemerintahan wajib yaitu Urusan Kebudayaan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Kebijakan SPBS ini dibentuk atas dasar upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi dan mengembangkan potensi serta kekayaan kebudayaan sunda yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang secara sistematis agar dapat terus terjaga keberadaannya. Kini melalui kebijakan SPBS telah tercapai beberapa peningkatan dalam hal perlindungan kebudayaan.

Kabupaten Sumedang yang dikenal sebagai "Puseur Budaya Sunda" memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari seni tradisional, adat istiadat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan berbagai organisasi kebudayaan di Sumedang menjadi ujung tombak dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya tersebut.

Disparbudpora Kabupaten Sumedang memegang peran strategis dalam pembinaan organisasi kebudayaan sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda di bidang kebudayaan. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat karakter pemuda yang berlandaskan nilai-nilai budaya lokal serta mendorong mereka menjadi agen perubahan dalam melestarikan dan mempromosikan kebudayaan daerah.

Disparbudpora melaksanakan pembinaan melalui berbagai strategi, seperti pelatihan seni budaya, penguatan kelompok seni tradisional, serta penyelenggaraan festival dan pameran budaya. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kebudayaan agar mampu menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Pembinaan melibatkan berbagai bentuk dukungan, termasuk pelatihan teknis, bantuan dana, dan promosi kegiatan budaya, untuk memastikan aktivitas budaya di Kabupaten Sumedang semakin berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Program pembinaan ini juga harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam bidang kebudayaan. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya mendukung pelestarian budaya di tingkat lokal tetapi juga berkontribusi pada tujuan pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara nasional.

Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tercatat per November 2022, terdapat 11.622 warisan budaya yang dicatat dan 1.728 di antaranya telah ditetapkan. Sedangkan, warisan budaya takbenda Indonesia pada tahun 2023 bertambah sejumlah 213 menjadi 1.941 warisan budaya yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, jumlah warisan budaya takbenda Indonesia bertambah sejumlah 272 menjadi 2.212 warisan budaya yang telah ditetapkan.

Disparbudpora Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa terdapat empat organisasi kebudayaan yang tersebar di wilayah kabupaten Sumedang organisasi- organisasi ini memiliki fokus yang beragam. Organisasi-organisasi yang ada di Sumedang yang dinaungi Bidang Kebudayaan DISPARBUDPORA, yaitu diantaranya Yayasan Puspa Karima, Yayasan Yaskures, Yayasan YPSA Museum Geusan Ulun, dan Yayasan Bangreng.

Adapun Karya Budaya Tradisional Kabupaten Sumedang diantaranya, Seni Bangreng, Seni Gembyung, Kuda Renggong, Ketuk Tilu Cikeruhan atau Tari Cikeruhan, Tari Gotong Domba, Reak Kreasi, Tarawangsa, Rengkong, Tayuban, Angklung Jenglung, Songah, Umbul, Celempung, Calung, Goong Renteng, Seni Kromong Eyang Jangel, Reog, Samroh, Tanji, Adu Domba atau Katangkasna Domba. Hasil dari pencatatan ternyata seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki kesenian tradisional baik yang umum maupun yang khas. Beberapa kesenian yang umum misalnya marawis, tarawangsa, silat, dan sebagainya dapat ditemukan di setiap kecamatan. Sedangkan yang khas seperti seni Gotong Domba hanya ada di wilayah Kecamatan Jatininggor.

Namun dalam pelestarian nilai-nilai budaya tradisional serta menjaga keberlangsungan seni tradisi, perlu adanya penanganan pembinaan secara serius baik dari instansi terkait maupun dari seluruh lapisan masyarakat, organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang seni budaya. Apabila tidak secepatnya ditangani secara dini tidak menutup kemungkinan kesenian daerah akan punah dengan sendirinya. Hal ini berarti generasi penerus tidak mempunyai jati diri yang telah diwariskan oleh pendahulunya. Sehubungan dengan itu, Balai Pelestarian Nilai Budaya melakukan Inventarisasi dan Dokumentasi Karya Budaya Indonesia dalam bentuk pencatatan Warisan Budaya yang ada di Kabupaten Sumedang Khususnya Kesenian Tradisional.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi- indikasi permasalahan yang menunjukkan bahwa pembinaan organisasi kebudayaan belum optimal karena terdapat beberapa kendala-kendala atau permasalahan yang peneliti temukan di DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang, yaitu indikasi sebagai berikut:

1. Minimnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung kebudayaan, masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya, promosi kebudayaan juga dinilai masih kurang optimal dan perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.
2. Kurangnya koordinasi dan penguatan kelembagaan antara pemerintah dan kelompok budaya, serta lemahnya penguatan kelembagaan, mengakibatkan program pelatihan tidak berjalan efektif dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
3. Pengaturan strategi dalam penentuan metode dan sasaran pembinaan budaya masih belum optimal, sehingga tujuan pembinaan belum tercapai secara maksimal. Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan organisasi kebudayaan sering menghadapi hambatan, yang mengurangi efektivitas kolaborasi. Metode yang digunakan oleh Disparbudpora dan bidang terkait, khususnya bidang kebudayaan, masih dalam tahap pencarian strategi yang tepat untuk memastikan program pembinaan mampu memenuhi kebutuhan pengembangan budaya. Ketidak efektifan ini menjadi tantangan besar, terutama dalam menghadapi modernisasi dan digitalisasi yang terus berkembang.

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti objek alamiah, dimensi peneliti adalah instrument sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pada umumnya metode penelitian kualitatif mengambil jumlah informan yang sedikit daripada metode penelitian yang lain. Unit Analisa dalam penelitian ini yaitu individu/perorangan. Peneliti mengambil sampel beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai informan mengenai digital governance dalam promosi wisata oleh kapid, Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, staf analis pariwisata di Dinas Pariwisata Budaya Pemuda Olahraga Kabupaten Sumedang.

Menurut Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa Populasi diartikan Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Penentuan informan penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2013: 301) mengatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penempatan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

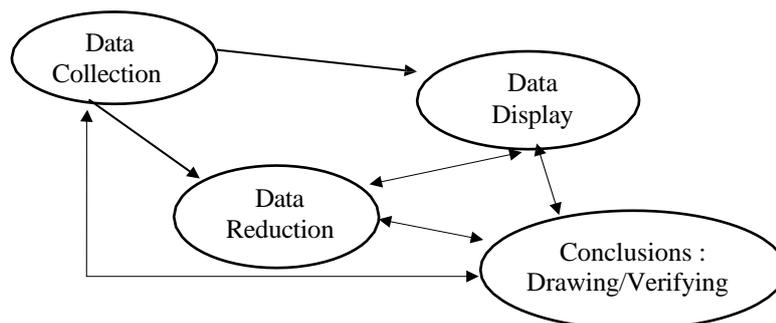
Tabel 1. Informan Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1.	Kepala Bidang Kebudayaan	1
2.	Jabatan Fungsional Bidang Kebudayaan	1
3.	Staff Kesenian dan Budaya Daerah	1
4.	Staff Kesenian dan Budaya Daerah	1
Jumlah		4

Untuk pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan teknik pengumpulan data penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
 - a. Observasi,
 - b. Wawancara,
 - c. Dokumentasi

Untuk mengelola data hasil observasi dan wawancara, peneliti melakukan pengolahan data dengan mengacu pada teknik analisis data model Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2016: 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 1. Komponen Dalam Analisis Data

Sumber: Miles and Huberman (Sugiyono 2022: 134)

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pembinaan organisasi kebudayaan adalah sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda di bidang kebudayaan. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat karakter pemuda yang berlandaskan nilai-nilai budaya lokal serta mendorong mereka menjadi agen perubahan dalam melestarikan dan mempromosikan kebudayaan daerah.

Berdasarkan kepada definisi tersebut, pembinaan organisasi kebudayaan dapat diwujudkan dengan melalui penerapan dimensi-dimensi dari pembinaan itu sendiri. Dengan demikian, untuk mengukur pembinaan organisasi kebudayaan di dinas pariwisata kebudayaan dan olahraga dapat dilihat dari 4 dimensi yang dikemukakan oleh Mathis (2017:307-308) sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Penelitian Pembinaan Organisasi Kebudayaan Di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Dimensi	Kesimpulan
1. Mengatur Strategi	Hal ini sudah cukup baik karena pembinaan bidang kebudayaan pada penyusunan pedoman pembinaan di disarbudpora telah melakukan semaksimal mungkin dalam mengatur Strategi pembinaan kebudayaan mulai dari pembuatan kerangka acuan kerja dan target-target kerja tahunan pada pembinaan
2. Merencanakan	Hal ini sudah cukup baik karena penentuan metode pembinaan di lakukan dengan terjun langsung ke lapangan.
3. Mengorganisasi dan Melaksanakan	Hal ini sudah cukup baik karena jadwal kegiatan kebudayaan dilakukan pada hari-hari besar dan sesuai kebutuhan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana telah di lakukan dengan maksimal, terlihat dari adanya gedung kesenian dan watanter.
4. Mengukur dan Mengevaluasi	Hal ini sudah baik karena Pengukuran hasil dengan standar bahwa hal-hal yang dapat di ukur dalam pengukuran hasil dengan standar pada pembinaan kelompok bidang kebudayaan itu dapat di lihat dari hasil capaian target yang telah tercapai pada pelaksanaan pembinaan.

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas maka lebih lanjut peneliti menjelaskan kondisi masing-masing dimensi pembinaan organisasi kebudayaan di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

a. Mengatur Strategi

Strategi pembinaan kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga telah menunjukkan arah yang cukup baik dan terstruktur. Hal ini tampak dari penyusunan kerangka acuan kerja dan penetapan target tahunan yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan. Proses ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menyusun langkah strategis secara sistematis dan berorientasi pada hasil, yang penting dalam pembangunan bidang kebudayaan yang dinamis dan kompleks

Keselarasn strategi dengan visi dan misi organisasi juga menjadi poin penting dalam proses pengaturan ini. Perencanaan strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan kebudayaan nasional memungkinkan kegiatan yang dilakukan tidak hanya kontekstual secara lokal, tetapi juga berkontribusi dalam kerangka pembangunan nasional. Strategi yang dirancang dengan mempertimbangkan perencanaan jangka menengah dan panjang akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Meskipun telah berjalan cukup baik, strategi yang disusun tidak lepas dari tantangan dan kendala, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum merata, dan dinamika sosial budaya yang cepat berubah. Tantangan ini menuntut strategi yang adaptif dan fleksibel, sehingga dapat segera menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, strategi yang terlalu birokratis dan tidak memperhatikan faktor eksternal akan berisiko menjadi tidak efektif

Sebagai pembelajaran, strategi yang disusun oleh disparbudpora dapat dibandingkan dengan strategi di daerah lain yang telah berhasil membangun model pembinaan berbasis komunitas budaya. Daerah seperti Yogyakarta dan Bali, misalnya, dikenal sukses dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan strategi pembangunan ekonomi kreatif berbasis budaya. Perbandingan ini bukan untuk meniru, melainkan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi lokal bisa diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan

Menurut Sofyan Effendi (2016), strategi dalam organisasi publik seharusnya tidak hanya berupa perencanaan tertulis, tetapi juga merupakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya. Strategi yang efektif harus mampu menjawab tantangan lingkungan internal dan eksternal serta memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Dalam konteks ini, strategi yang dirancang disparbudpora sudah berada pada jalur yang benar, tetapi tetap memerlukan penguatan berbasis bukti dan refleksi evaluatif secara berkala agar semakin adaptif dan berkelanjutan.

b. Merencanakan

Perencanaan dalam pembinaan kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga tampak cukup baik, ditunjukkan dengan adanya keterlibatan langsung ke lapangan dalam merumuskan metode pembinaan. Pendekatan ini memperlihatkan adanya sensitivitas terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dirancang lebih kontekstual dan berbasis fakta. Langkah ini penting karena memastikan bahwa perencanaan tidak bersifat top-down semata, melainkan juga mempertimbangkan dinamika di akar rumput.

Keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku budaya dalam proses perencanaan merupakan bentuk pendekatan partisipatif yang sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan hanya objek, maka aspirasi dan potensi lokal bisa tergali secara optimal. Kegiatan seperti diskusi kelompok terarah (FGD), wawancara mendalam, dan observasi langsung menjadi metode yang efektif dalam menyusun rencana program yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi riil di masyarakat.

Kualitas data yang digunakan dalam perencanaan juga menjadi faktor penting yang mendukung akurasi program. Tanpa data yang valid dan mutakhir, perencanaan berisiko salah sasaran atau bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, pendekatan lapangan yang dilakukan disparbudpora tidak hanya memberikan pemahaman empirik, tetapi juga membentuk basis data yang bisa digunakan untuk menyusun indikator kinerja dan alat evaluasi program yang lebih akurat.

Selain itu, perencanaan pembinaan yang baik juga mencerminkan adanya kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun waktu. Integrasi antara hasil pemetaan lapangan dan kerangka perencanaan organisasi memungkinkan terbentuknya rencana kerja yang realistis dan dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan bukan hanya proses administratif, tetapi juga bagian dari upaya strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Mulyadi (2018) menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan karena mampu menjawab kebutuhan lokal sekaligus membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Perencanaan yang dirancang berdasarkan realitas sosial akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Dalam konteks ini, disparbudpora telah menunjukkan pendekatan perencanaan yang cukup tepat,

meskipun tetap perlu adanya penguatan kapasitas analisis kebijakan agar proses perencanaan tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif terhadap perubahan sosial budaya.

c. Mengorganisasi dan melaksanakan

Pengorganisasian dan pelaksanaan program pembinaan kebudayaan oleh Disparbudpora telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menyusun kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan momentum budaya seperti hari besar nasional atau hari adat setempat. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa organisasi telah mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam menentukan waktu dan bentuk pelaksanaan kegiatan.

Struktur organisasi pelaksana dan mekanisme koordinasi antarbidang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Keterlibatan unit kerja internal maupun mitra eksternal seperti sanggar seni, komunitas budaya, serta tokoh adat menjadi kekuatan dalam membentuk jejaring kerja yang efektif. Kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif juga mencerminkan adanya pendekatan manajemen partisipatif dalam pelaksanaan, yang dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap program.

Sarana dan prasarana turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Adanya gedung kesenian, ruang latihan, dan infrastruktur pendukung lainnya menjadi elemen penting dalam memberikan ruang ekspresi bagi pelaku budaya. Tanpa dukungan fasilitas fisik yang memadai, pelaksanaan program hanya bersifat simbolik dan berpotensi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan sarpras budaya adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan pembinaan.

Pelaksanaan program juga perlu mempertimbangkan aspek fleksibilitas terhadap perubahan. Dalam konteks dinamika sosial saat ini, perubahan minat generasi muda terhadap budaya lokal perlu direspons dengan inovasi kegiatan, misalnya melalui integrasi teknologi, media sosial, atau pendekatan kreatif berbasis digital. Hal ini penting agar program pembinaan tidak hanya relevan, tetapi juga menarik bagi kelompok usia muda sebagai penerus budaya.

Wahyudi (2017) menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan program publik sangat bergantung pada kesiapan organisasi, koordinasi internal, serta ketersediaan sumber daya. Ketika organisasi mampu merespons kebutuhan masyarakat melalui struktur kerja yang lincah dan dukungan fasilitas yang memadai, maka pelaksanaan program akan lebih optimal. Dalam hal ini, disparbudpora sudah menunjukkan indikator keberhasilan tersebut, meskipun ruang inovasi dan evaluasi tetap perlu diperluas.

d. Mengukur dan mengevaluasi

Proses pengukuran dan evaluasi terhadap hasil pembinaan kebudayaan telah dilakukan dengan menggunakan standar capaian target. Langkah ini menunjukkan bahwa disparbudpora memiliki kerangka evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil, bukan hanya proses. Evaluasi yang berbasis target memungkinkan organisasi mengetahui sejauh mana kegiatan telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan evaluasi juga melibatkan instrumen pemantauan yang dilakukan secara berkala. Monitoring kegiatan menjadi dasar bagi evaluasi menyeluruh, terutama dalam mengidentifikasi tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan. Dengan sistem ini, organisasi memiliki peluang untuk memperbaiki desain program di masa mendatang dan meningkatkan efektivitas intervensi pembinaan budaya.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan indikator kualitatif yang mampu menangkap aspek transformasi sosial atau peningkatan kesadaran budaya masyarakat. Evaluasi yang terlalu fokus pada output fisik atau administratif sering kali mengabaikan dampak jangka panjang seperti perubahan nilai, partisipasi komunitas, atau pelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan metode evaluasi yang lebih reflektif dan mendalam.

Tindak lanjut dari hasil evaluasi menjadi bagian penting dalam penguatan siklus kebijakan. Ketika evaluasi hanya dijadikan laporan formal, maka manfaatnya tidak optimal. Sebaliknya, hasil evaluasi harus digunakan untuk menyesuaikan strategi, merancang program lanjutan, dan memperbaiki kelemahan pelaksanaan. Di sinilah fungsi evaluasi sebagai alat pembelajaran organisasi menjadi sangat penting.

Sutrisno (2020) menegaskan bahwa evaluasi sektor publik idealnya mencakup dimensi kuantitatif dan kualitatif serta mempertimbangkan perspektif keberlanjutan. Evaluasi bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga media refleksi dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, disparbudpora sudah menerapkan evaluasi berbasis target, namun perlu menambahkan pendekatan kualitatif agar hasil pembinaan lebih bermakna dan berkelanjutan.

4. CONCLUSION

Pembinaan organisasi kebudayaan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang secara umum telah menunjukkan arah yang cukup baik. Dimensi strategi menunjukkan adanya penyusunan langkah yang terstruktur, dengan perencanaan yang disesuaikan terhadap visi, misi, dan kebijakan daerah maupun nasional. Meski demikian, terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta dinamika sosial yang memerlukan penyesuaian strategi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan.

Dari sisi perencanaan, pendekatan yang dilakukan menunjukkan adanya keterlibatan langsung dengan masyarakat dan pelaku budaya. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Perencanaan dilakukan berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui observasi dan interaksi langsung, sehingga hasilnya menjadi lebih kontekstual dan operasional. Selain itu, kualitas data serta kemampuan dalam mengelola sumber daya turut mendukung terbentuknya rencana kerja yang realistis dan terarah.

Pada aspek pelaksanaan dan evaluasi, program pembinaan telah dijalankan dengan mempertimbangkan momentum budaya serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan berfokus pada capaian target, namun masih perlu dikembangkan pada aspek dampak sosial dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, upaya pembinaan telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih diperlukan peningkatan pada fleksibilitas strategi, partisipasi masyarakat, serta kualitas evaluasi.

REFERENCES

- A.S Moenir. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- A.S, Munandar. (2001). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: UI.
- Akadun. (2009). *Adminstrasi Perusahaan Negara*, Bandung: CV. Alfabeta
- Akadun. (2011). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Bailah. (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Effendi, S. (2016). *Manajemen Strategis Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathoni, Abdurrahmat, (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnely, J. H. (2018). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. (Terjemahan) Edisi Delapan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P, (2012). *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke. Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin, (2016). *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Koentjaraningrat. (1990). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marvin, H. (1999). *Theories of Culture in Postmodern Times - Marvin Harris*, University of Florida - Google Buku. (diakses pada 28 oktober 2024).
- Mathis, Robert L dan John H. Jackson, (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Buku 1, Alih Bahasa: Jimmy Sadeli dan Bayu. Prawira Hie, Salemba Empat. Jakarta.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2018). *Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, harbani. (2017). *Teori Penelitian Administrasi Publik*., Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulbert. (2011). *Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Soekanto, Soejono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik: Pendekatan Evaluatif dan Reflektif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Thoha, Miftah. (2016). *Pembinaan Organisasi, proses dianosa dan intervensi*., Manajemen Kepemimpinan. Yogyakarta: Gava Media.
- Umam, K. (2018). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahyudi, D. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Teori dan Praktik dalam Konteks Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.